

Evaluasi Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun (Studi Kartu Identitas Anak Di Kecamatan Tebing)

Mohd Riko Asyamsuli¹ Eko Handrian²

Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Riau, Jl. Kharudin Nasution
No. 133 Perhentian Marpoyan, Pekanbaru, Indonesia
mohdrikoasyamsuli@student.uir.ac.id ekohandrian@soc.uir.ac.id

Received : February 27, 2024;

Accepted : 30 Juli 2024

Abstract

The Child Identity Card (KIA) is the government's latest initiative aimed at improving population services by enhancing the administration of civil registration, particularly for children under 17 years old who do not yet possess a national population identity. This research aims to evaluate the implementation of population administration, specifically concerning KIA, in the Department of Population and Civil Registration of Karimun Regency. The methods utilized include descriptive and quantitative approaches, employing data collection techniques such as questionnaires, observations, interviews, and documentation. The findings indicate that the implementation of KIA is not yet optimal due to various inhibiting factors, including effectiveness, efficiency, sufficiency, distribution, responsiveness, and timeliness. This evaluation is crucial in aiding the government to improve population services and ensure better fulfillment of children's constitutional rights in the future.

Keywords: *Evaluation, Administration, Child Identity Card*

Abstrak

Kartu Identitas Anak (KIA) merupakan inisiatif terbaru pemerintah dalam rangka meningkatkan pelayanan kependudukan dengan memperbaiki tata kelola administrasi kependudukan, terutama untuk anak-anak di bawah 17 tahun yang belum memiliki identitas penduduk secara nasional. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi implementasi administrasi kependudukan, khususnya terkait dengan KIA, di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karimun. Metode yang digunakan adalah pendekatan deskriptif dan kuantitatif dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui kuesioner, observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi KIA belum optimal karena masih banyak faktor yang menghambat, baik dalam hal efektivitas, efisiensi, kecukupan, perataan, responsivitas, maupun ketepatan waktu. Evaluasi ini penting untuk membantu pemerintah dalam meningkatkan pelayanan kependudukan dan memastikan pemenuhan hak konstitusional anak-anak secara lebih baik di masa mendatang.

Kata Kunci : *Evaluasi, Adminisitrasi, Kartu Identitas Anak*

Pendahuluan

Kartu Identitas Anak merupakan inisiatif terbaru dalam bidang kependudukan yang diterapkan oleh pemerintah di sejumlah Kabupaten dan Kota di Indonesia mulai tahun 2016. Program ini bertujuan untuk memberikan pelayanan kependudukan dengan menerbitkan dokumen identitas sebagai bagian dari proses pencatatan sipil.

Kartu Identitas Anak merupakan program yang diberikan sebagai wujud komitmen otoritas publik untuk memberikan karakter masyarakat kepada seluruh masyarakatnya yang sah secara luas untuk memberdayakan perluasan jangkauan informasi bagi anak, keamanan dan administrasi publik untuk memahami kebebasan terbaik, khususnya bagi anak, Jadi penting untuk memberikan karakter masyarakat, khususnya kepada anak-anak. Dengan memberikan karakter kepada anak melalui Kartu Identitas Anak akan memberdayakan jangkauan informasi yang lebih luas, perlindungan dan pelayanan publik untuk memberikan yang terbaik bagi setiap anak Indonesia.

Inti dari pemberian Kartu Identitas Anak ini adalah inisiatif yang didukung oleh wajib pajak untuk mengupayakan keberhasilan administrasi kerangka organisasi kependudukan dan bagaimana informasi tentang jumlah anak dapat disegarkan dengan tepat. Selain itu, pedoman ini juga diberikan sebagai bentuk komitmen pemerintah untuk memberikan karakter masyarakat kepada setiap penduduknya yang sah secara luas. Wali dapat mengajukan permohonan untuk memberikan Kartu Identitas Anak kepada anaknya sehubungan dengan pengumpulan informasi, asuransi dan administrasi publik untuk mengetahui keistimewaan terbaik bagi anak itu sendiri.

Manfaat dari program Kartu Identitas Anak adalah memberikan bukti yang jelas tentang identitas anak-anak berusia 0 hingga 17 tahun kurang satu hari. Selain itu, KIA dapat digunakan sebagai syarat pendaftaran sekolah, untuk keperluan pembuatan KTP dan pelaporan migrasi, serta untuk mengurus klaim santunan bagi pemegang KIA. KIA juga membantu mencegah penyalahgunaan anak, memberikan diskon pada kegiatan bermain dan pembelian buku, serta untuk berbagai tujuan lain yang memerlukan verifikasi identitas anak.

Dengan adanya kewajiban bagi setiap anak untuk memiliki KIA selain wujud dari perlindungan hak atas identitas juga merupakan bagian berkesinambungan bagi Pemerintah untuk melakukan pendataan administrasi kependudukan yang terintegrasi secara nasional sebagaimana telah diatur sebelumnya dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Pelaksanaan Kartu Identitas Anak dilakukan di setiap Provinsi di Indonesia, yang berjumlah 34 Provinsi. Ini berarti bahwa semua Provinsi di Indonesia diharuskan untuk melaksanakan program Kartu Identitas Anak, dengan penetapan Kabupaten dan Kota pelaksanaan berdasarkan pertimbangan dari pemerintah daerah yang berlaku. Contohnya, di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), tepatnya di Kabupaten Karimun, program ini telah diterapkan sejak sekitar tahun 2017.

Dalam menjalankan tugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun Berjalan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan, yaitu melalui Standar Operasional Prosedur (SOP). Berikut SOP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kabupaten Karimun dalam pembuatan Kartu Identitas Anak. Untuk melihat bagaimana proses nya berikut saya sajikan SOP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun.

Tinjauan Pustaka

Pada tingkat dasar, penilaian adalah salah satu siklus tingkat dalam strategi terbuka, penilaian adalah metode survei terlepas dari apakah suatu pengaturan atau pelaksanaan berjalan dengan baik. Penilaian adalah evaluasi, pemberian angka dan penilaian, kata-kata yang mengungkapkan upaya membedah strategi menghasilkan satuan-satuan nilai yang signifikan dalam arti yang lebih jelas, penilaian menyangkut pengembangan data berkenaan dengan nilai informasi manfaat hasil strategi. .

Evaluasi adalah gerakan yang mensurvei hasil yang diperoleh selama latihan pengecekan terus menerus. Lebih dari itu, Evaluasi juga mengevaluasi outcome atau hal-hal yang telah dicapai dari suatu perkembangan pelaksanaan sebagai dasar pengambilan kesimpulan mengenai tingkat kemajuan yang telah dicapai dan kegiatan lanjutan yang diperlukan.

Evaluasi adalah penilaian yang objektif dan sistematis terhadap suatu intervensi yang sedang direncanakan, sedang berlangsung, atau sudah diselesaikan. Hal-hal yang harus dinilai meliputi proyek, implementasi, kebijakan, organisasi, sektor, tema, dan bantuan negara (Mukarom dan Lasana, 2016).

1. Tujuan dan Fungsi Evaluasi

- a. Evaluasi efek suatu implementasi atau kebijakan pada kehidupan masyarakat melalui perbandingan kondisi sebelum dan setelah implementasi dilakukan, memerlukan pendekatan metodologi penelitian. Sementara itu, membandingkan efek dengan tujuan mengharuskan penggunaan kriteria untuk menilai keberhasilan.
- b. Mendapatkan informasi tentang kinerja implementasi kebijakan serta mengevaluasi kesesuaian dan perubahan implementasi dengan rencana yang ada.
- c. Memberikan umpan balik kepada manajemen untuk perbaikan atau penyempurnaan implementasi kebijakan.
- d. Memberikan rekomendasi kepada pembuat kebijakan untuk pengambilan keputusan lanjutan tentang implementasi di masa mendatang, sebagai bagian dari pertanggungjawaban publik atau untuk memenuhi akuntabilitas (Mukarom dan Laksana, 2016).

Fungsi evaluasi adalah untuk memastikan akuntabilitas publik. Oleh karena itu, sebuah studi evaluasi harus mampu memenuhi esensi akuntabilitas tersebut dengan cara berikut:

- a. Memberikan penjelasan yang logis tentang realitas pelaksanaan implementasi atau kebijakan, termasuk kausalitas atau sebab akibatnya.
- b. Menilai kepatuhan dengan melihat kesesuaian antara pelaksanaan dan standar serta prosedur yang telah ditetapkan.

- c. Melakukan audit untuk menilai apakah output kebijakan mencapai tujuan yang ditetapkan. Meneliti apakah ada kebocoran dan penyimpangan dalam penggunaan anggaran, serta apakah ada penyimpangan dari tujuan implementasi dan pelaksanaannya.
- d. Melakukan akuntansi untuk mengukur dampak sosial-ekonomi dari kebijakan. Ini termasuk mengevaluasi sejauh mana implementasi yang dimaksud dapat meningkatkan pendapatan masyarakat, apakah dampak yang timbul sudah sesuai dengan yang diharapkan, dan apakah ada dampak yang tidak diinginkan.

2. Ruang Lingkup Evaluasi Implementasi

Menurut Azwar, evaluasi dapat dibagi menjadi tiga kelompok:

- a. Evaluasi input berfokus pada penggunaan berbagai sumber daya, termasuk dana, tenaga kerja, dan fasilitas yang tersedia.
- b. Evaluasi proses menekankan pada pelaksanaan implementasi, menilai apakah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, mulai dari tahap perencanaan, pengorganisasian, hingga pelaksanaan.
- c. Evaluasi output dilakukan setelah implementasi selesai (evaluasi formatif) dengan tujuan mengukur hasil yang dihasilkan dan dampak yang terjadi.

3. Indikator Evaluasi Kebijakan

William Dunn (dalam Novan, 2020) mengatakan bahwa untuk mengevaluasi keberhasilan suatu kebijakan, perlu menentukan beberapa indikator, yang meliputi:

1. Efektivitas

Efektivitas adalah ukuran yang sesuai dengan pencapaian target yang telah ditetapkan oleh tata kelola, dan apakah hasil yang diharapkan telah tercapai. Konsep efektivitas berasal dari kata "efektif" yang mengacu pada pencapaian efek yang diinginkan dalam suatu pekerjaan. Efektivitas menjadi elemen kunci dalam mencapai tujuan atau target yang telah ditetapkan dalam setiap organisasi. Istilah efektivitas juga merujuk pada pencapaian tujuan atau target yang telah ditetapkan sebelumnya dengan berhasil.

2. Efisiensi

Efisiensi adalah kemampuan untuk menggunakan sumber daya yang tersedia dengan tepat dan menggunakan biaya secara efektif dengan menghasilkan yang diinginkan. Efisiensi harus selalu dapat diukur secara kualitatif, dan merupakan hasil dari usaha yang berhasil melebihi usaha yang dikeluarkan. Konsep efisiensi lebih menitikberatkan pada cara mencapai hasil yang diinginkan dengan membandingkan input yang digunakan dengan output yang dihasilkan.

3. Kecukupan

Kecukupan digunakan untuk mengevaluasi apakah hasil yang dicapai sesuai dengan harapan yang diinginkan. Hal ini juga mengacu pada pencapaian tujuan yang dianggap memadai dalam berbagai aspek. Kecukupan terkait dengan sejauh mana tingkat efektivitas dapat memenuhi kebutuhan, nilai, atau peluang yang mungkin timbul sebagai masalah.

4. Responsivitas

Mohd Riko Asyamsuli dan Eko Handrian

Journal of Public Administration Review Vol. 1 No. 1 / 2024

427

Responsivitas mengukur sejauh mana kebijakan dapat memenuhi kebutuhan, preferensi, atau nilai dari kelompok-kelompok masyarakat tertentu. Indikator ini memiliki pentingnya karena meskipun keefektifan, efisiensi, kecukupan, dan kesetaraan telah dipenuhi, namun jika kebijakan tidak merespons kebutuhan aktual dari kelompok yang seharusnya diuntungkan oleh kebijakan tersebut, maka analisis tersebut belum lengkap.

5. Pemerataan

Pemerataan adalah indikator yang terkait dengan kesesuaian secara legal dan sosial serta mengevaluasi distribusi efek dan upaya antara berbagai kelompok dalam masyarakat. Tujuannya adalah untuk mengukur sejauh mana manfaat yang diberikan oleh kebijakan tersebar dengan merata di antara kelompok sasaran.

6. Ketepatan

Ketepatan adalah indikator yang digunakan untuk menilai sejauh mana hasil atau tujuan yang diinginkan benar-benar bermanfaat atau bernilai. Indikator ini digunakan untuk menilai sejumlah alternatif dan menentukan apakah hasil dari alternatif yang direkomendasikan tersebut layak dipilih sebagai tujuan yang tepat.

7. Evaluasi Kebijakan Pelayanan Publik

Secara umum, evaluasi kebijakan memiliki beragam variasi tergantung pada tujuan dan tingkat yang ingin dicapai. Dilihat dari segi waktu evaluasi, terdapat dua jenis, yaitu evaluasi kebijakan preventif dan evaluasi kebijakan sumatif. Implementasi dimulai pada tahap penyusunan implementasi kebijakan.

Metode

Tipe penelitian yang diterapkan adalah pendekatan deskriptif, karena peneliti berupaya memperoleh informasi yang akurat mengenai subjek penelitian dan hasil analisisnya. Fokus penelitian deskriptif adalah memberikan gambaran yang realistis tentang Evaluasi Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun (Studi Kasus: Kartu Identitas Anak di Kecamatan Tebing).

Metode yang dipilih untuk penyelenggaraan penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif. Keputusan ini didasarkan pada metodologi kuantitatif yang, menurut Sugiyono (2017), merujuk pada penelitian yang didasarkan pada filsafat positivisme. Pendekatan ini digunakan untuk menyelidiki populasi dan sampel tertentu dengan pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian serta analisis data yang bersifat kuantitatif.

Hasil dan Pembahasan

Tanggapan Responden Masyarakat yang Sudah Mengurus Kartu Identitas Anak mengenai Indikator Efektivitas

NO	Item Pertanyaan	Kategori Penilaian			Jumlah
		T	CT	KT	

1.	Tujuan atau Sasaran yang telah ditentukan sebelumnya	3 (15.00%)	10 (50.00%)	7 (35.00%)	20 (100%)
2.	Hasil yang diinginkan tercapai	2 (10.00%)	6 (30,00%)	12 (60,00%)	20 (100%)
Jumlah		5	16	19	40
Rata-Rata		2,5 (12,50%)	8 (40,00%)	9,5 (47,50%)	20 (100%)
Skor		15	32	19	66
Persentase		55,00%			
Kategori		Cukup Terlaksana			

Sumber : data olahan penulis, 2023

Berdasarkan observasi peneliti, Mayoritas responden menyatakan bahwa program ini cukup terlaksana dengan baik, sejalan dengan tanggapan Kepala Disdukcapil yang menyatakan bahwa program ini masih jauh dari kata tercapai.

Dengan demikian, ada kebutuhan mendesak untuk meningkatkan pemahaman dan partisipasi masyarakat dalam mengurus Kartu Identitas Anak. Evaluasi lebih lanjut terhadap pelaksanaan program diperlukan untuk mengidentifikasi kendala-kendala yang perlu ditangani

Tanggapan Responden Masyarakat yang sudah mengurus Kartu Identitas Anak berdasarkan indikator Efisiensi

NO	Item Pertanyaan	KATEGORI PENILAIAN			Jumlah
		T	CT	KT	
1.	Ketepatan dalam penggunaan anggaran	14 (70,00%)	4 (20,00%)	2 (10,00%)	20 (100%)
2.	Waktu yang diperlukan dalam proses penerbitan Kartu Identitas Anak	13 (65,00%)	6 (30,00%)	1 (5,00%)	20 (100%)

Jumlah	27	10	3	40
Rata-Rata	13,5 (67,50%)	5 (25,00%)	1,5 (7,50%)	20 (100%)
Jumlah Skor	81	20	3	104
Persentase	86,67%			
Kategori	Terlaksana			

Sumber :data olahan penulis 2024

berdasarkan tanggapan terbanyak dari responden masyarakat yang telah mengurus Kartu Identitas Anak pada indikator efisiensi, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar responden (86,67%) menilai bahwa aspek efisiensi dalam pelaksanaan program tersebut sudah terlaksana dengan baik. Meskipun terdapat kendala teknis atau logistik, hal ini menunjukkan bahwa upaya yang telah dilakukan oleh Disdukcapil dalam meningkatkan efisiensi layanan telah memberikan hasil yang positif, meskipun masih ada ruang untuk peningkatan lebih lanjut.

Tanggapan Responden Masyarakat yang sudah mengurus Kartu Identitas Anak berdasarkan indikator Kecukupan

NO	Item Pertanyaan	Kategori Penilaian			Jumlah
		T	CT	KT	
1.	Ketersediaan informasi yang memadai bagi masyarakat terkait proses penerbitan KIA	1 (5,00%)	2 (35,00%)	17 (60,00%)	20 (100%)
2.	Seberapa jauh tingkat efektifitas memuaskan kebutuhan	-	4 (40,00%)	16 (60,00%)	20 (100%)
Jumlah		1	6	33	40
Rata-Rata		1 (5,00%)	7 (35,00%)	12 (60,00%)	20 (100%)
Jumlah Skor		3	18	33	54
Persentase		45,00%			
Kategori		Cukup Terlaksana			

Sumber :data olahan penulis 2024

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa meskipun sosialisasi telah dilakukan, keterlambatan dalam pelaksanaannya akibat dari situasi pandemi menyebabkan penyebaran informasi tentang KIA menjadi tertunda. Hal ini mungkin mempengaruhi persepsi dan partisipasi masyarakat dalam mengurus Kartu Identitas Anak. Sebagai hasilnya, mayoritas responden masyarakat yang telah mengurus KIA menilai bahwa

kecukupan pelaksanaan program ini terbilang cukup terlaksana, dengan persentase sebesar 45,00%.

Tanggapan Responden Masyarakat yang sudah mengurus Kartu Identitas Anak berdasarkan indikator Pemerataan

NO	Item pertanyaan	KATEGORI PENILAIAN			Jumlah
		T	CT	KT	
1.	Mengukur kebijakan secara merata untuk masyarakat	1 (5,00%)	13 (65,00%)	6 (30,00%)	20 (100%)
2.	Keadilan pelaksanaan program	3 (15,00%)	8 (40,00%)	9 (45,00%)	20 (100%)
Jumlah		4	21	15	40
Rata-Rata		2 (10,00%)	10,5 (52,50%)	7,5 (37,50%)	20 (100%)
Jumlah Skor		12	42	15	69
Persentase		57,50%			
Kategori		Cukup Terlaksana			

Sumber :data olahan penulis 2024

Berdasarkan hasil observasi, mayoritas responden masyarakat menilai bahwa indikator pemerataan dalam pengurusan KIA dinilai "Cukup Terlaksana" dengan persentase 57,50%. Hal ini menunjukkan bahwa prosedur pengurusan KIA yang telah disampaikan oleh Ibu Marni dianggap cukup mampu untuk memastikan akses yang merata bagi masyarakat yang memenuhi syarat.

Tanggapan Responden Masyarakat yang sudah mengurus Kartu Identitas Anak berdasarkan indikator Responsivitas

NO	Item Pertanyaan	KATEGORI PENILAIAN			Jumlah
		T	CT	KT	
1.	Pelaksanaan program KIA dalam pemenuhan harapan public	-	9 (45,00%)	11 (55,00%)	20 (100%)
2.	Seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan suatu kebutuhan atau kelompok masyarakat	1 (5,00%)	14 (70,00%)	5 (25,00%)	20 (100%)

Jumlah	1	23	16	40
Rata-Rata	1 (5,00%)	11 (55,00%)	8 (40,00%)	20 (100%)
Jumlah Skor	3	46	16	65
Persentase	54,17%			
Kategori	Cukup Terlaksana			

Sumber :data olahan penulis 2024

pemahaman masyarakat tentang manfaat penggunaan Kartu Identitas Anak (KIA) menjadi kendala yang perlu diatasi. Meskipun indikator pemerataan dalam pengurusan KIA dinilai "Cukup Terlaksana" oleh mayoritas responden, kesadaran akan manfaat KIA masih rendah. Hal ini menunjukkan bahwa informasi yang diberikan kepada masyarakat belum cukup memadai atau mungkin belum disampaikan secara efektif.

Tanggapan Responden Masyarakat yang sudah mengurus Kartu Identitas Anak berdasarkan indikator Ketepatan

NO	Item Pertanyaan	Kategori Penilaian			Jumlah
		T	CT	KT	
1.	Mengukur hasil yang diinginkan benar benar berguna	1 (5,00%)	13 (65,00%)	6 (30,00%)	20 (100%)
2.	Pelaksanaan program KIA sesuai dengan rencana	1 (5,00%)	9 (45,00%)	10 (50,00%)	20 (100%)
Jumlah		2	22	16	40
Rata-Rata		1 (5,00%)	11 (55,00%)	8 (40,00%)	20 (100%)
Jumlah Skor		6	44	16	65
Persentase		55,00%			
Kategori		Cukup Terlaksana			

Sumber :data olahan penulis 2024

Berdasarkan hasil observasi penulis di lapangan terlihat bahwa partisipasi masyarakat masih cukup rendah, dikarenakan beberapa faktor seperti rendah nya kesadaran dan pemahaman masyarakat akan manfaat penggunaan Kartu Identitas Anak.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa Evaluasi Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun (Studi Kartu Identitas Anak di Kecamatan Tebing) berada pada kategori "Cukup Terimplementasi" dari berbagai indikator yang sudah ada namun belum terlaksana secara

penuh. Indikator kecukupan masih memiliki kekurangan seperti halnya alat untuk mencetak kartu Identitas Anak hanya ada satu unit saja, jika alat tersebut rusak atau memiliki kendala nantinya dapat menghambat proses penerbitan Kartu Identitas Anak. Serta yang terpenting masih kurangnya pemahaman dan rendahnya partisipasi masyarakat akan pentingnya memiliki kartu identitas anak. Butuhnya kerjasama antara pihak dinas dengan pihak sekolah sekolah untuk dapat bekerja sama untuk melakukan sosialisasi di sekolah sekolah untuk dapat membuat Kartu Identitas Anak, lalu juga pihak dinas untuk kedepannya juga harus bisa fleksibel dalam proses pendaftarannya, tidak harus lagi masyarakat datang ke Disdukcapil, agar dapat memperluas jangkauan Kartu Identitas Anak.

Jadi berdasarkan pada teori Evaluasi kebijakan public menurut William N Dunn mengacu kepada beberapa indikator dapat disimpulkan bahwa :

1. Efektivitas

implementasi program Kartu Identitas Anak belum mencapai tingkat efektivitas yang diharapkan. Meskipun informasi terkait KIA sudah tersedia di kantor Disdukcapil, masih terdapat kendala dalam pemahaman dan partisipasi masyarakat. Mayoritas responden menyatakan bahwa program ini kurang terimplementasi dengan baik, sejalan dengan tanggapan Kepala Disdukcapil yang menyatakan bahwa program ini masih jauh dari kata tercapai.

2. Efisiensi

dapat disimpulkan bahwa meskipun Disdukcapil memiliki fasilitas dan sumber daya manusia yang memadai, serta telah berupaya menjaga ketepatan waktu dalam pelayanan, terdapat kendala teknis atau logistik seperti kerusakan peralatan atau kelangkaan bahan mentah yang dapat mempengaruhi operasional. Oleh karena itu, evaluasi dan perbaikan terus-menerus diperlukan untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan yang diberikan oleh Disdukcapil.

3. Kecukupan

dapat disimpulkan bahwa meskipun sosialisasi telah dilakukan, keterlambatan dalam pelaksanaannya akibat dari situasi pandemi menyebabkan penyebarluasan informasi tentang KIA menjadi tertunda. Hal ini mungkin mempengaruhi persepsi dan partisipasi masyarakat dalam mengurus Kartu Identitas Anak.

4. Pemerataan

Dapat disimpulkan bahwa prosedur pengurusan KIA di Kabupaten Karimun telah disederhanakan dan diatur agar lebih mudah diakses oleh masyarakat yang memenuhi syarat. Adanya alternatif melalui perantara pihak lurah setempat juga menunjukkan upaya untuk mempermudah akses bagi masyarakat yang tidak berada di Kabupaten Karimun namun memenuhi syarat untuk mengurus KIA.

5. Responsivitas

dapat disimpulkan bahwa kurangnya pemahaman masyarakat tentang manfaat penggunaan Kartu Identitas Anak (KIA) menjadi kendala yang perlu diatasi. Meskipun indikator pemerataan dalam pengurusan KIA dinilai "Cukup Terlaksana" oleh mayoritas responden, kesadaran akan manfaat KIA masih rendah. Hal ini menunjukkan bahwa

informasi yang diberikan kepada masyarakat belum cukup memadai atau mungkin belum disampaikan secara efektif. Dalam hal ini, perlu adanya upaya yang lebih besar dalam memberikan pemahaman yang jelas dan komprehensif mengenai manfaat yang sebenarnya dari KIA.

6. Ketepatan

Berdasarkan hasil observasi penulis di lapangan terlihat bahwa partisipasi masyarakat masih cukup rendah, dikarenakan beberapa faktor seperti rendahnya kesadaran dan pemahaman masyarakat akan manfaat penggunaan Kartu Identitas Anak.

Daftar Pustaka

Buku dan Jurnal:

Agustino, L. (2014). *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.

Agustino, L. (2016). *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.

Handrian, E., & Andry, H. (2020). Sustainable Development Goals: Tinjauan Percepatan Pencapaian di Provinsi Riau. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 6(1), 77-87.

Handrian, E., Muslikhah, U., & Rosmita, R. (2024). Diffusion of Application Policy Innovation Pekan Kita (PEKA) in Pekanbaru City. *Jurnal Administrasi Publik*, 15(1).

Andry, H., & Handrian, E. (2017, November). E-Implementation of E-Government In Regional Financial Management (Study at the Regional Finance and Asset Management Board of Riau Province). In *International Conference on Democracy, Accountability and Governance (ICODAG 2017)* (pp. 152-155). Atlantis Press.

Handrian, E., Rosmita, R., & Suriani, L. (2023). Inclusive Development for Marginal Group Street Trader in Tembilahan Indragiri Hilir District. *Jurnal Administrasi Publik*, 14(1).

Handrian, E. (2019). Pengaruh Reformasi Birokrasi Terhadap Kualitas Pelayanan Pembuatan Surat Izin Mengemudi Golongan C (Sim C) Pada Sat Lintas Polresta Pekanbaru. *Publika: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 5(1), 137-155.

Handrian, E., & Andry, H. (2020). Penguatan Pemerintahan Daerah Dalam Pengelolaan Kawasan Perbatasan Di Kabupaten Kepulauan Meranti. *Jurnal Kemunting*, 1(2), 183-203.

Handrian, E., & Hawa, S. (2022). Implementasi program pengembangan perikanan tangkap pada Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru. *JIAP (Jurnal Ilmu Administrasi Publik)*, 10(1), 49-58.

Nurman, Yusriadi, Y., & Hamim, S. (2022). Development of pluralism education in Indonesia. *Journal of Ethnic and Cultural Studies*, 9(3), 106-120.

- Nasri, H., Nurman, N., Azwirman, A., Zainal, Z., & Riauan, I. (2022). Implementation of collaboration planning and budget performance information for special allocation fund in budget planning in the regional development planning agency of Rokan Hilir regency. *International Journal of Health Sciences (IJHS) Ecuador*, 6(S4), 639-651.
- Nurman, N., Zainal, Z., & Rajasa, Y. (2021). Good Governance in Structure Belantik Raya People's Market in Siak District. *Jurnal Kajian Pemerintah: Journal of Government, Social and Politics*, 7(2), 1-11.
- Nurman, M. P. (2015). Strategi Pembangunan Daerah.
- Rusli, R., & Nurman, N. (2016). Implementasi Fungsi Koordinasi Camat Dalam Pembuatan Kartu Keluarga Dan Kartu Tanda Penduduk Di Kecamatan Dumai Barat Kota Dumai. *Jurnal Kajian Pemerintah: Journal of Government, Social and Politics*, 2(1), 27-39.
- Parjiyana, P. (2015). Implementasi Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 128 Tahun 2004 Tentang Kebijakan Dasar Pusat Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Kajian Pemerintah: Journal of Government, Social and Politics*, 1(2), 41-54.
- Fista, L., & Parjiyana, P. (2024). Pelaksanaan Fungsi Kepala Desa Dalam Pembinaan Kemasyarakatan Di Desa Kuantan Babu Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu. *Journal of Public Administration Review*, 1(1), 26-36.
- Parjiyana, P., Nazir, Y., Wedayanti, M. D., & Mardianto, M. (2019). Peranan Kepala Dusun Dalam Membantu Tugas Kepala Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 5(2), 198-205.
- Afhissa, C., & Parjiyana, P. (2017). Analisis Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Pimpinan di Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BDLHK) Pekanbaru. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 3(2), 207-223.
- Marcella, A., & Parjiyana, P. (2018). ANALISIS PELAYANAN UMUM DI PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) TIRTA INDRA KABUPATEN INDRAGIRI HULU. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 4(1), 17-35.
- Suriani, L., Nisa, K., & Affandi, L. H. (2023). Pelaksanaan Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila Tema Gaya Hidup Berkelanjutan di Sekolah Dasar. *Jurnal Educatio FKIP UNMA*, 9(3), 1458-1463.
- Suriani, L., & Lumintang, G. (2018). Pengaruh Kompensasi, Disiplin Kerja Dan Etika Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Di Pt. Transindo Jaya Bahari Maumbi Manado. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 6(4).
- Suriani, L., & Sidabutar, O. J. (2019). Kualitas Pelayanan Dan Peraturan Tata Tertib Perpustakaan Terhadap Kepuasan Pemustaka Di Perpustakaan Soeman Hs. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 5(2), 190-197.
- Handrian, E., Rosmita, R., & Suriani, L. (2023). Inclusive Development for Marginal Group Street Trader in Tembilahan Indragiri Hilir District. *Jurnal Administrasi Publik*, 14(1).

- Syafitri, I., & Suriani, L. (2019). Peran Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Di Desa Sejati Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 5(1), 44-54.
- Hamim, S., Vianda, L., & Pitaloka, S. (2020). Penerapan Prinsip Prinsip Pelayanan Publik Di Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk Dan Catatan Sipil Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Pekanbaru. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 6(1), 1-10.
- Adnan, I. M., & Hamim, S. (2013). *Administrasi, Organisasi Dan Manajemen Suatu Ilmu, Teori, Konsep Dan Aplikasi*.
- Hamim, S. (2005). *Sistem Perencanaan Strategis Dalam Pembangunan*.
- Adnan, I. M., & Hamim, S. (2013). *Administrasi, Organisasi Dan Manajemen Suatu Ilmu, Teori, Konsep Dan Aplikasi*.
- Adnan, I. M., & Hamim, S. (2014). *Filsafat Ilmu, Ilmu Pengetahuan dan Penelitian*.
- Andry, H., & Yussa, A. T. (2015). *Perilaku dan Etika Administrasi Publik*. Pekanbaru: Marpoyan Tujuh Publishing.
- Handrian, E., & Andry, H. (2020). Sustainable Development Goals: Tinjauan Percepatan Pencapaian di Provinsi Riau. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 6(1), 77-87.
- Andry, H. (2017). Pelayanan Publik Pengurusan Izin Mendirikan Bangunan Di Kecamatan Mandau Oleh Dinas Tata Kota, Tata Ruang Dan Pemukiman Kabupaten Bengkalis. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 3(1), 66-79.
- Andry, H., & Zulkifli, Z. (2023). Evaluasi pengelolaan parkir oleh dinas perhubungan kota pekanbaru. *Eqien-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 12(02), 194-205.
- Andry, H., Herman, H., & Rahmah, J. (2023). PELAKSANAAN KOORDINASI DINAS KESEHATAN KOTA PEKANBARU DAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA PEKANBARU DALAM PENGHAPUSAN ASET KENDARAAN DINAS OPERASIONAL KHUSUS (AMBULANCE). *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (JISIP)*, 12(1), 18-28.
- Abdullah, S., Hamim, S., & Ermayuna, S. (2021). Strategi Pembangunan Pertanian Tanaman Pangan Di Lahan Gambut Desa Pulau Palas Kabupaten Indragiri Hilir. *Pascasarjana Ilmu Administrasi Universitas Islam Riau*, 1-83.
- Anggara, B., & Abdullah, S. (2017). Pelaksanaan Pengawasan Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Pekanbaru Dalam Pendistribusian Gas Lpg 3 Kg Di Kota Pekanbaru. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 3(2), 248-261.
- Ariswanto, N. S., & Abdullah, S. (2016). Analisis Pelaksanaan Kewenangan Badan Permusyawaratan Desa (Bpd) Di Desa Berumbung Baru Kecamatan Dayun Kabupaten Siak. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 2(2), 197-215.
- Herman, H., Kartius, K., Abdullah, S., & Hasibuan, C. R. (2024). Collaborative Governance In Overcoming Unemployment in Bengkalis Regency, Riau Province. *PERSPEKTIF*, 13(1), 164-173.

- Abdullah, S., & Safri, I. (2023). Pemberdayaan Masyarakat Dalam Mengelola Potensi Masyarakat Desa Kampung Panjang Kabupaten Kampar. *Masyarakat Berdaya dan Inovasi*, 4(2), 242-248.
- Nurmasari, N., & Al Hafis, R. I. (2019). Desentralisasi Asimetris: Kemiskinan ditengah kelimpahan otonomi khusus papua. *JPAP: Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, 5(2), 1180-1192.
- Nurmasari, N., Komalasari, E., Muliando, B., Nurman, N., & Amrillah, M. F. (2024). PELATIHAN INOVASI BANK SAMPAH PLASTIK UNTUK PENINGKATAN PENDAPATAN EKONOMI MASYARAKAT DI BANK SAMPAH PUAN SARI MANDIRI. *Jurnal ADAM: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(1), 35-40.
- Kurniawan, R., & Nurmasari, N. (2017). Analisis Kinerja Pegawai Pada Bidang Pelayanan Dan Informasi Di Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Siak. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 3(1), 122-134.
- Afringgo, R., Nurmasari, N., & Zubaidah, E. (2021). Efektifitas E-Warong sebagai Sarana Pengintegrasian Tujuan Program Keluarga Harapan pada Kelompok Target KUBE Berkah Harapan di Kota Pekanbaru. *Jurnal Ranah Publik Indonesia Kontemporer (Rapik)*, 1(1), 22-29.
- Nurmasari, N., & Wedayanti, M. D. (2018, August). HUMAN RESOURCE MANAGEMENT CIVIL SERVANT EMPLOYEES IN THE FRAMEWORK OF REFORM BUREAUATION IN RIAU PROVINCE. In *ICSScE 2018*.
- Herman, H., Suriani, L., & Farisha, N. (2021). Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Sampah Pada Pasar Milik Pemerintah Kota Pekanbaru. *Publikauma: Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area*, 9(2), 81-90.
- Herman, H. (2019). Pelaksanaan Corporate Social Responsibility Oleh Stakeholders Primer Dan Skunder Di Riau. *Jurnal Ilmiah Manajemen Publik Dan Kebijakan Sosial*, 2(2).
- Herman, H., & Novarizal, R. (2017). Faktor-faktor ideal perusahaan dalam pelaksanaan CSR (Corporate Social Responsibility). *Sisi Lain Realita*, 2(2), 39-53.
- Nengsih, I. A., & Herman, H. (2019). Strategi Pelayanan Izin Praktek Dokter Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTP) Kota Pekanbaru. *Asketik*, 3 (2), 163-175.
- Novarizal, R., & Herman, H. (2019). Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan Terhadap Kemungkinan Terjadinya Pelarian (Studi Kasus Lapas Kelas II A Pekanbaru): Universitas Islam Riau. *Sisi Lain Realita*, 4(1), 90-102.
- Suri, D. M. (2017). Analisis faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan penertiban dan pembinaan gelandangan dan pengemis di kota pekanbaru. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 3(1), 89-101.
- Suri, D. M., & Nurmandi, A. (2021, July). Deep learning methods as a detection tools for forest fire decision making process fire prevention in Indonesia. In *International Conference on Human-Computer Interaction* (pp. 177-182). Cham: Springer International Publishing.

- Suri, D. M., Nurmandi, A., Qodir, Z., & Al Fadhat, F. (2021). Narrative Policy Framework: The Role Of Media Narrative Towards Forest And Land Fire Policy In Indonesia. *Universitas Muhammadiyah Yogyakarta*.
- Hildawati, H., & Suri, D. M. (2020). Potensi UEK-SP Kelurahan Rimba Sekampung Untuk Transformasi Menjadi Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Di Kota Dumai. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 6(1), 24-42.
- Yogia, M. A., & Suri, D. M. (2020). Implementasi Kebijakan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Usaha Ekonomi Kelurahan. *Sosio Konsepsia*, 9(03), 247-256.
- Al Hafis, R. I., & Yogya, M. A. (2017). Abuse of power: Tinjauan terhadap penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat publik di Indonesia. *Publika: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 3(1), 80-88.
- Hafis, A., Imam, R., Hakim, A., & Haryono, B. S. (2014). Aktor Pelaksana Pengelolaan Transportasi Publik Perkotaan (Studi Kasus Bus Trans Metro Di Kota Pekanbaru). *Jurnal Wacana*, 16(4), 171-178.
- Al Hafis, R. I. (2018). Pembangunan Daerah Perbatasan Yang Terabaikan: Kajian Perbatasan Kecamatan Rupert Utara Kabupaten Bengkalis–Selat Malaka. *Gema Publica*, 3(2), 111-119.
- Al Hafis, R. I., Warsono, H., Larasati, E., & Purnaweni, H. (2021). The paradox of collaborative governance in leprosy rehabilitation in Central Java. *Management and Entrepreneurship: Trends of Development*, 3(17), 55-67.
- Al Hafis, R. I., Wardana, D., Setiawati, S., & Putra, A. I. (2024). Proses Collaborative Governance untuk Mengurangi Dampak Abrasi. *Kaganga: Jurnal Pendidikan Sejarah dan Riset Sosial Humaniora*, 7(1), 521-529.
- Lubis, E. F., & Zubaidah, E. (2020). Efektivitas Program Keluarga Harapan Dalam Penanggulangan Kemiskinan. *Societas: Jurnal Ilmu Administrasi dan Sosial*, 9(2), 88-99.
- Zubaidah, E., & Lubis, E. F. (2021). Inovasi Layanan Aplikasi e-Samsat Dalam Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Di Provinsi Riau. *Jurnal Niara*, 14(2), 120-125.
- Zubaidah, E. (2018). Analisis Manajemen Perkantoran Dalam Meningkatkan Kinerja Pegawai PT. Pegadaian Persero Kantor Wilayah II Pekanbaru. In *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Administrasi Perkantoran*.
- Zubaidah, E., Nurmandi, A., Pribadi, U., Hidayati, M., & Lubis, E. F. (2022, March). The Factors Influencing the Community to Use E-Service in Pekanbaru City, Indonesia. In *International Conference on Public Organization (ICONPO 2021)* (pp. 310-318). Atlantis Press.
- Zubaidah, E. (2016). MANAJEMEN PANTI ASUHAN DALAM PERSPEKTIF HENRI FAYOL:(STUDY KASUS PANTI ASUHAN USMAN BIN AFFAN). *VALUTA*, 2(1), 130-139.
- Wedayanti, M. D., Nurmandi, A., Jubba, H., & Pulungan, B. I. (2022). Political Interaction Strategy Corporate Social Responsibility of PT Riau Andalan Pulp and Paper in

Riau Province, Indonesia. *International Journal of Sustainable Development & Planning*, 17(8).

- Wedayanti, M. D., & Susanti, H. (2019). Pengembangan Pariwisata Berbasis Masyarakat (CBT) Menggunakan Kontribusi Corporate Social Responsibility (CSR) di Pekanbaru Provinsi Riau. *WEDANA: Jurnal Kajian Pemerintahan, Politik dan Birokrasi*, 5(2), 32-37.
- Wedayanti, M. D., Nurmandi, A., Jubba, H., & Juliana, S. (2021, January). Implementation of Corporate Social Responsibility in PT. Riau Andalan Pulp and Paper in Pelalawan District, Riau Province. In *INCEESS 2020: Proceedings of the 1st International Conference on Economics Engineering and Social Science, InCEESS 2020, 17-18 July, Bekasi, Indonesia* (p. 71). European Alliance for Innovation.
- Wedayanti, M. D., & Zulkifli, Z. (2015). Pelaksanaan Pengawasan Barang dan Jasa Beredar Oleh Seksi Perlindungan Konsumen Pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 1(1), 52-72.
- Parjiyana, P., Nazir, Y., Wedayanti, M. D., & Mardianto, M. (2019). Peranan Kepala Dusun Dalam Membantu Tugas Kepala Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 5(2), 198-205.
- Lubis, E. F., & Zubaidah, E. (2020). Efektivitas Program Keluarga Harapan Dalam Penanggulangan Kemiskinan. *Societas: Jurnal Ilmu Administrasi dan Sosial*, 9(2), 88-99.
- Lubis, E. F., & Zubaidah, E. (2019). Efektivitas Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga (PMB-RW) Dalam Mewujudkan Prinsip Tridaya Di Kota Pekanbaru. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 5(2), 156-163.
- Lubis, E. F. (2015). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (Pnpm Mpd)(Studi Kasus: Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan Di Nagari Tanjung Betung Kabupaten Pasaman). *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 1(2), 304-317.
- Lubis, E. F., & Indira, T. T. (2023). PENGARUH STORE ATMOSPHERE TERHADAP KEPUASAN KONSUMEN PADA AYAM PENYET CINDELARAS BAGAN BATU KABUPATEN ROKAN HILIR. *PubBis: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Administrasi Publik dan Administrasi Bisnis*, 7(1), 1-9.
- Lubis, E. E. F. (2024). PELATIHAN PEMBUATAN SABUN CUCI PIRING UNTUK MENINGKATKAN TAMBAHAN PENDAPATAN PADA IBU-IBU KELOMPOK MELATI PUTIH DALAM PROGRAM KELUARGA HARAPAN DI KECAMATAN SUKAJADI KOTA PEKANBARU. *Multidisciplinary Indonesian Center Journal (MICJO)*, 1(1), 120-126.
- Herman, H., Kartius, K., Abdullah, S., & Hasibuan, C. R. (2024). Collaborative Governance In Overcoming Unemployment in Bengkalis Regency, Riau Province. *PERSPEKTIF*, 13(1), 164-173.

- Handrian, E., Rosmita, R., Suriani, L., & Kartius, K. (2022). Reformasi Badan Usaha Milik Desa Kesumbo Sejahtera di Desa Kesumbo Ampai Kabupaten Bengkalis. *Jurnal Mandala Pengabdian Masyarakat*, 3(2), 231-237.
- Kurniawan, A. (2020). Pengaruh Kepemimpinan Diri Sendiri Terhadap Sikap Wirausaha Pada Usaha Makanan Tradisional Di Desa Palung Raya Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 6(2), 179-191.
- Kurniawan, A., Rezki, D., & Riau, U. I. (2023). Collaborative Governance Dalam Menangulangi Banjir di Kota Sungai Penuh Collaborative Governance in Overcoming Floods in the City of Sungai Penuh. *Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, 9(1), 1-18.
- TARMIZI, A., KURNIAWAN, A., ADERISKA, M., & AFRIZAL, T. (2022). Analysis of Quality Electronic Identity Card Service in Sub-District West Meral of Karimun District, Riau Islands (Integrated Sub-District Administration Service Model "Paten"). *International Journal of Society, Development and Environment in the Developing World*, 6, 62-72.
- Tarmizi, A., & Kurniawan, A. (2017). Model Administrasi Pribumi Masyarakat Adat Melayu Petalangan di Desa Sialang Godang Kabupaten Pelalawan Riau. In *Seminar Nasional "Mitigasi dan Strategi Adaptasi Dampak Perubahan Iklim di Indonesia"* (pp. 165-177).
- Yusa, A. T., Andry, H., & Kurniawan, A. (2016). Restorasi Paradigma KUD:" Pendekatan Teori Organisasi Dalam Merebut Peluang MEA".
- Yunisman, Y., Salioso, H., Febrianto, S., Prayuda, R., & Mardatillah, A. (2022). Analysis of quality of animal health services by veterinary medical and veterinary paramedic services in food security and agricultural agency of Rokan Hilir Regency. *International Journal of Health Sciences*, 14(3), 1030-1046.
- Larasati, D., Indrastuti, S., Salioso, H., Yussa, H. A., & Suri, D. M. (2022). Analysis of the effect of job satisfaction and job motivation on the performance of cleaning officers at the environmental service agency Rokan Hilir district Indonesia. *International Journal of Health Sciences*, 6(4), 573-588.
- Salioso, H. (2016). ASN, OTDA, Politik Pilkada Serentak dan Korupsi di Indonesia. *SISI LAIN REALITA*, 1(1), 01-07.
- Adha, M. L., & Salioso, H. (2024). KINERJA ORGANISASI DI KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN BASARNAS KELAS A PEKANBARU. *JURNAL KEMUNTING*, 5(1), 1-16.
- Askarial, A., Rinaldi, K., & Salioso, H. (2016). Kota Dumai Dalam Pidato Seorang Walikota.
- Maksudi, B. I. (2017). *Dasar-Dasar Administrasi Publik*. Depok: Rajawali Pers.
- Dunn, W. N. (2003). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Gajah Mada University Press.
- Muhammad Syukran, A. A. (2022). KONSEP ORGANISASI DAN PENGORGANISASIAN DALAM . *PUBLIK: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi dan Pelayanan Publik* , 98.
- Mulyadi, D. (2018). *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*. Bandung : Alfabeta.

- Pasolong, H. (2014). Teori Administrasi Publik. Bandung: Alfabeta.
- Pasolong, H. (2019). Teori Administrasi Publik. Bandung: Alfabeta.
- Prasetya, M. N. (2017). Membangun Kembali Budaya Maritim Indonesia: Melalui Romantisme . Jurnal PIR Vol.1 No. 2, 1.
- Sugiyono. (2017). Metode Penelitain Kuantitatif,Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2014). Memahami Penelitian Kualitatif. Alfabeta.
- Wedayanti, M. D. (2018). Manajemen Corporate Social Responsibility. Pekanbaru: Marpoyan Tujuh Publishing.
- Buding, A., & Sila, sri nur. (2020). Efektivitas Program Pelayanan Administrasi
- Kartika, E. W. (2020). Kualitas Pelayanan Kartu Identitas Anak Di Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto.
<http://repository.untag-sby.ac.id/5814/>
- Pratama, & Fauzi. (2018). Efektivitas Program Bimbingan Kerja dalam Mengembangkan Life Skill Warga Binaan Penjara. Keguruan Dan Ilmu Pendidikan, 2(2), 126–140.
- Aivanni, N. (2016). Anggaran Kartu Identitas Anak sekitar Rp8 Miliar.

Regulasi :

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.
- UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak. (n.d.).
- Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Administrasi